

TREND JURNALISME TELEVISI*

Oleh Ashadi Siregar

(1)

Pembicaraan tentang trend jurnalisme televisi dapat dilakukan dengan mudah, tapi bisa juga sulit. Mudah jika yang dibicarakan adalah trend secara konseptual. Tersedia sejumlah buku-teks yang memaparkan jurnalisme televisi, dengan pendekatan kesejarahan, dapat ditunjukkan trend atau kecenderungan dinamis dari perkembangan jurnalisme televisi. Jurnalisme televisi yang berkembang sejak tahun 40-an hingga menjelang akhir abad ini, menyimpan banyak cerita. Mulai dari semacam jurnalisme radio yang ditampilkan di bawah lampu terang dan kamera, sampai teknologi satelit dan media interaktif dalam pemberitaan (Westin, 1982; Stephens, 1986; Jacobs, 1990; Wallis & Baran, 1990).

Sementara untuk membicarakan trend jurnalisme televisi di Indonesia, tentunya soal lain. Jurnalisme televisi mana yang dimaksud? Jurnalisme televisi yang dijalankan oleh stasiun televisi sebagai media organik pemerintah, tentunya berbeda dengan jurnalisme televisi yang dijalankan oleh stasiun televisi swasta. Sementara televisi swasta baru muncul tahun 1989, dan jurnalisme televisi baru menggeliat mulai tahun 90-an ini (Goonasakera & Holaday, 1992). Bagaimana mau melihat trend dari suatu perjalanan singkat?

(2)

Terlepas dari trendnya, permasalahan jurnalisme televisi di Indonesia dapat dikembalikan ke akarnya. Bahwa jurnalisme adalah kaidah kerja dalam memungut fakta sosial untuk dijadikan informasi, untuk kemudian disampaikan melalui media massa. Kaidah jurnalisme mengandung standar dalam memilih fakta sosial dan mewujudkan informasi. Ada kalanya kaidah kerja jurnalisme menyesuaikan diri dengan karakter media yang akan menjadi penyampainya. Penyesuaian ini pada dasarnya bukan dalam orientasi etis, tetapi hanya menyangkut aspek teknik (*technicalities*). Orientasi etis berkaitan dengan substansi informasi, sementara aspek teknik membawa implikasi kepada format informasi. Secara sederhana kedua hal ini, pertama menyangkut apa yang menjadi dasar bagi orang media dalam memilih fakta sosial. Inilah sesungguhnya yang ditangkap dan disimpan sebagai pengetahuan oleh khalayak. Sedangkan hal kedua, bagaimana informasi disajikan, merupakan pintu masuk dalam menikmati suatu informasi.

Kedua hal ini sama pentingnya, dapat diibaratkan dengan makanan yang bermanfaat dan enak. Ada yang lebih suka kepada makanan bermanfaat, walaupun mengabaikan rasa enak. Dan ada yang sebaliknya. Tetapi normalnya, orang biasanya menyukai makanan yang bermanfaat sekaligus enak, keduanya secara optimal. Dalam jurnalisme, keseimbangan kaidah orientasi etis dan teknis inilah yang menjaga sajian informasi pada tingkat optimal.

Kendati terdapat perbedaan karakter berbagai media massa, dari sisi wajahnya sebagai penyampai informasi jurnalisme, selama bertolak dari orientasi etisnya, pada dasarnya tidak ada perbedaan satu sama lain. Media penyiaran (*broadcasting*) radio dan televisi, media pers (cetak), bahkan media internet, sepanjang menggunakan orientasi etis

* Disampaikan pada Seminar Dialog Liputan 6 SCTV, Surya Citra Televisi, Yogyakarta 5 April 1997

dalam jurnalisme, memiliki kesamaan. Yang membedakan hanyalah format informasinya, yang dibentuk dengan kaidah teknis yang berbeda.

Itulah sebabnya, media penyampai informasi jurnalisme atau informasi bersifat faktual, biasa pula disebut sebagai media jurnalisme, untuk dibedakan dari media hiburan yang berfungsi menyampaikan informasi hiburan yang bersifat fiksional. Suatu media massa dapat memiliki dua wajah, baik sebagai media jurnalisme maupun media hiburan. Dalam dua wajah ini biasanya ada yang dominan, yang diukur dari kecenderungan muatan yang disampaikan di satu pihak, dan persepsi khalayak di pihak lainnya. Pertanyaan adalah, apakah pengelola media memang berniat (*intended*) lebih mengutamakan informasi faktual, dan sebaliknya apakah khalayak berniat menjadikan media yang dihadapinya sebagai sumber mendapatkan informasi faktual (*perceived*).

Hubungan media dan khalayak diharapkan secara fungsional bersifat linier, antara intensi pengelola dan persepsi khalayak berlangsung dalam garis lurus secara komplementer. Namun dapat berlangsung penyimpangan, yaitu informasi yang bersifat faktual dipersepsikan oleh khalayak sebagai hiburan, atau informasi fiksional dipersepsikan oleh khalayak sebagai sumber untuk mendapatkan materi faktual. Hubungan bersifat disfungsional yang berlangsung antara media dan khalayaknya ini dapat dijadikan sebagai indikator sosial dari kehidupan normatif suatu masyarakat. Situasi anomali antara lain tercermin dari salah-fungsinya institusi sosial, termasuk media massa.

(3)

Media televisi memiliki karakter mimikri yang khas, wajahnya sebagai media hiburan dan jurnalisme dengan mudah bercampur-aduk. Secara institusional, stasiun televisi sejak awal dapat dibedakan dari karakter utamanya, yaitu intensi fungsional yang diembannya. (Summers, Summers & Pennybacker, 1978; Browne, 1989). Dikenal adanya 2 tipe orientasi penyiaran, yaitu tele-visi publik (*Public TV*) yang terdiri atas televisi pendidikan (*Educational TV*) yang difungsikan sebagai pendukung langsung proses pendidikan seperti pengajaran/instruksional. Tipe stasiun televisi ini dapat dijabarkan adalah substitusi pelatih/instruktur yang mengajar warga masyarakat untuk mencapai tingkat kemahiran teknis yang dapat digunakan dalam kehidupan sosialnya.

Dikenal pula jenis televisi publik lainnya, yang dimaksudkan sebagai institusi yang menjalankan fungsi pendidikan sosial. Stasiun ini dimaksudkan sebagai perpanjangan dari lembaga masyarakat yang berupaya mendidik warga masyarakat agar lebih mengapresiasi kehidupan dalam konteks norma sosial. Dapat berupa kehidupan keagamaan, atau idealisme sosial yang menjadi acuan bagi kehidupan normatif.

Dan tipe kedua adalah televisi komersial (*Commercial TV*) yang mengemban fungsi hiburan dan jurnalisme. Kalau boleh disebut stasiun ini hadir dengan menjual informasi fiksional dan faktual. Dalam kehadirannya ini, dia sendiri sebagai industri yang memiliki sifat ekonomi (*economical traits*). Pada pihak lain tvkomersial sebagai faktor penting sebagai pendukung dalam mekanisme ekonomi pasar.

Sejarah pertelevisian di Indonesia menunjukkan dinamika yang penuh dengan kecenderungan anomali. Karenanya sulit merumuskan teori yang jelas bagi penggambaran fenomena media ini. Siaran televisi sudah hadir sejak akhir tahun 1962, sebagai stasiun yang diselenggarakan oleh pemerintah, untuk menjalankan tugas utama sebagai media organik birokrasi pemerintah. Sebagai media organik dari suatu institusi, dengan sendirinya sulit mengharapakan dia menjadi suatu institusi yang memiliki otonomi dalam orientasi penyiarannya. Karenanya tidak pernah dikembangkan orientasi penyiaran yang mencakup hiburan dan jurnalisme yang mencerminkan institusi televisi.

Kedudukan pertelevisian ini dapat dipahami, jika ukuran yang digunakan adalah konsep tv-publik. Tetapi televisi yang ada bersifat monopoli, yaitu hanya boleh diselenggarakan oleh pemerintah, dan pada pihak lain tidak pernah ada dorongan (atau bahkan dihambat?) untuk munculnya tv-publik dari masyarakat (swasta). Maka dalam kondisi monopolistis ini masyarakat tidak pernah mengenal varian lain dari siaran televisi.

Baru pada tahun 1989, muncul televisi dari swasta dengan beroperasinya Rajawali Citra Televisi Indonesia (RCTI). Uniknya, masyarakat langsung menghadapi tv-komersial. Dimulai dengan sistem tertutup (berlangganan), sampai akhirnya penyiaran terbuka. Tentunya pemerintah punya alasan atas ketentuan pentahapan ini. Tetapi alasan ini pada dasarnya berdalih seolah untuk melindungi masyarakat dari terpaan stasiun tv swasta ini (Depari, 1994).

Di satu pihak prinsip (kalau memang ada konsep) melindungi khalayak ini memang penting. Pada pihak lain tidak kalah pentingnya adalah bagaimana sebenarnya konsep pembinaan untuk memperkembangkan stasiun tv-swasta. Kerancuan dalam konsep ini tercermin dari sikap overprotektif terhadap khalayak, dengan mengasumsikan bahwa kesiapan khalayak dalam menerima terpaan siaran tv-swasta, harus dibedakan melalui tingkat kemampuan ekonominya. Dengan kata lain, warga masyarakat yang memiliki kemampuan ekonomi untuk berlangganan siaran, dianggap lebih siap untuk menerima terpaan siaran.

Kerancuan lain terlihat pula dari regulasi melarang stasiun tv-swasta untuk menyiarkan berita atau informasi jurnalisme. Jika stasiun televisi tidak boleh menyiarkan informasi jurnalisme, maka tidak pelak stasiun tersebut diharapkan hanya menjadi media hiburan. Regulasi ini benar-benar konsep yang tidak bersifat membangun bagi kehadiran stasiun televisi nasional di Indonesia. Dengan konsep ini maka tercermin bahwa pemerintah menginginkan sistem pertelevisian di Indonesia hanya terdiri atas 2 tipe penyiaran, yaitu media organik pemerintah dan "tv-pay" dengan siaran sepenuhnya hiburan. Televisi berlangganan dengan spesifikasi semata-mata hiburan, menjalankan fungsi sebagai perpanjangan industri hiburan, musik dan sinema.

RCTI tentunya tidak dikonsepsikan sebagai perpanjangan industri hiburan, melainkan sebagai media massa yang memiliki karakter sebagai institusi sosial. Karenanya harus dihargai setinggi-tingginya gerilya para profesional di lingkungan stasiun tv-swasta untuk menghadirkan informasi faktual dalam program jurnalisme (Kelana, 1994). Atau setidaknya patut disyukuri bahwa pemilik stasiun tv-swasta itu cukup berwibawa untuk tidak mudah diinjak oleh pemerintah, sehingga nasibnya tidak seperti media yang dimiliki atau dijalankan warga masyarakat lainnya yang dengan mudah dibredel. Dalam batasan regulasi yang tidak jelas tujuannya itu, stasiun tv-swasta berupaya untuk menyajikan siaran berita (*newscast*). Setelah rintisan RCTI, terobosan stasiun ini layak dicatat dalam sejarah pertelevisian di Indonesia, disusul kemudian oleh stasiun tv-swasta SCTV, TPI, Antevision, dan Indosiar.

(4)

Jurnalisme televisi secara teknis perlu menyesuaikan diri dengan karakter medianya (Blum, 1984; Hilliard, 1991). Dari sini sudah terformat kaidah kerja, yaitu menjadikan fakta sosial sebagai tontonan. Dengan kata lain, dalam menghadapi program siaran berita, khalayak akan menonton fakta sosial. Sembari itu narasi yang disampaikan berupa cerita tentang fakta sosial. Karenanya secara sederhana jurnalisme televisi sering pula disebut sebagai upaya memungut fakta sosial yang dapat "ditulis" dengan kamera, dan menulis narasi kata untuk telinga.

"Menulis" dengan kamera dan menulis untuk telinga tentulah memerlukan disiplin dan metode kerja yang khas. Menulis dengan kamera memerlukan pemerian detail dari fakta sosial yang dapat diwujudkan secara visual. Tradisi sinematografi merupakan pangkal bagi aspek jurnalisme televisi ini. Sementara menulis dengan telinga, merupakan tradisi dari radio (Cohler, 1994).

Dilihat dari sejarahnya, TVRI sesungguhnya sangat beruntung sebagai suatu media baru di Indonesia. Dia dibangun dengan berbasiskan pada kedua tradisi tersebut, yaitu dengan dukungan orang-orang dari Perusahaan Film Negara (PFN) dan Radio Republik Indonesia (RRI). Dari sisi teknis, harus diakui keunggulan stasiun televisi ini.

Tetapi karena jurnalisme bukan hanya menyangkut aspek teknis, maka program siaran berita dari stasiun pemerintah ini tidak memiliki kekuatan. Dengan kata lain, kendati sudah berlangsung lebih seperempat abad, program siaran berita ini tidak dapat menjadi suatu genre dan acuan bagi pertelevisian di Indonesia.

Sebagai pelaksana media organik birokrasi pemerintah, *broadcaster* di stasiun tv-pemerintah ini harus menjalankan fungsi sebagai corong bagi pemerintah. Cara yang paling mudah akhirnya adalah langsung mempertontonkan para pejabat birokrasi berbicara. Menonton narasumber bicara sebenarnya hal yang lazim, karena suara asli (*original sound*) dari narasumber adalah sangat berharga. Tetapi nilai suara asli ini sangat ditentukan oleh substansi fakta yang disampaikan. Jika para narasumber tv-pemerintah itu berbicara secara otentik, berdasarkan pengalaman asli, niscaya akan menjadi berita. Tetapi yang banyak dipertontonkan adalah pejabat bicara dengan hapalan kutipan dari buku garis besar pembangunan atau petunjuk kerja, misalnya.

Sementara pengelola tv-swasta pada saat harus memperkembangkan jurnalisme televisi, berbeda pangkal tolaknya. Tv-swasta tidak didukung oleh personel dengan tradisi sinematografi dan radio. Kalaupun ada orang dengan tradisi sinematografi memasuki dunia pertelevisian, biasanya untuk memproduksi program fiktional. Sementara dari tradisi radio nyaris tidak dapat sebagai intake, kendati stasiun radio swasta sudah hadir sejak awal Orde Baru, jurnalisme radio (swasta) sama sekali beku akibat terhambat oleh regulasi pemerintah. Maka kehadiran jurnalisme televisi (swasta) di Indonesia pun bersifat anomali. Pengelola yang berasal dari media cetak harus jatuh-bangun dalam menghadirkan jurnalisme televisi. Tetapi anomali ini ada hikmahnya, yaitu tidak mewarisi pola-pola jurnalisme radio dan televisi ala stasiun pemerintah yang sudah ada sebelumnya.

Tradisi jurnalisme yang dapat diambil adalah standar kelayakan fakta sosial. Ukuran yang digunakan dalam menilai fakta sosial untuk dijadikan informasi jurnalisme pada dasarnya tidak berbeda, sepanjang media memiliki orientasi untuk melayani masyarakat. Dengan kata lain, pilihan atas fakta sosial bertolak dari rumusan yang diasumsikan sebagai pemenuhan kepentingan masyarakat konsumen media.

REFERENSI

- Blum, Richard A. (1984) *Television Writing, from Concept to Contract*, revised edition, Focal Press, Boston
- Browne, Donald R. (1989), *Comparing Broadcast System, the Experience of Six Industrialized Nations*, Iowa State University Press, Ames
- Cohler, David Keith (1994), *Broadcast Journalism A Guide for the Presentation of Radio and Television News*, second edition, Prentice Hall, Englewood Cliffs, New Jersey
- Depari, Eduard (1994), "Jurnalisme Penyiaran di Indonesia" makalah dalam Proceeding Workshop *Jurnalistik Media Siaran (Broadcasting Journalism)*, Yogyakarta 18 -

- 19 Agustus 1994, kerjasama Lembaga Penelitian Pendidikan Penerbitan Yogya - Komite Media Citra, Yogyakarta.
- Goonasekera, Anura dan Holaday, Duncan (ed.) (1993), *Asian Communication Handbook*, Asian Mass Communication Research and Information Centre, Singapore
- Hilliard, Robert L. (1991), *Writing for Television and Radio*, fifth edition, Wadsworth Publishing Company, Belmont
- Jacobs, Jerry (1990), *Changing Channels Issues and Realities in Television News*, Mayfield Publishing Company, Mountain View California
- Kelana, Chrys (1994), Transkripsi dari uraian lisan, dalam Proceeding Workshop *Jurnalistik Media Siaran (Broadcasting Journalism)*, Yogyakarta 18 - 19 Agustus 1994, kerjasama Lembaga Penelitian Pendidikan Penerbitan Yogya - Komite Media Citra, Yogyakarta.
- Stephens, Mitchell (1986), *Broadcast News*, second edition, Holt, Rinehart and Winston, Inc., Forth Worth
- Summers, Harrison B., Summers, Robert E., Pennybacker, John H., (1978), *Broadcasting and the Public*, Wadsworth Publishing Company, Inc., Belmont
- Wallis, Roger dan Baran Stanley (1990), *The Known World of Broadcast News, International News and the Electronic Media*, Routledge, London
- Westin, A.V. (1982), *News Watch How TV Decides the News*, Simon and Schuster, Gulf & Western Corporation, New York